



Membangun Keadilan Kewarganegaraan melalui Sinergi Nilai Islam dan Pancasila

Ammelia Anna Vhony^{1*}, Sidiatafa Nur Fauziah², Annisa Nurhanifah³, Alifah Nur Anisah⁴

¹⁻⁴ Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

*Penulis Korespondensi: munstain.nasoha@staff.uinsaid.ac.id

Abstract. *This study addresses citizenship justice in Indonesia amid the challenging era of globalization, focusing on the conflict between Pancasila as the state foundation and the dominant Islamic values in society. The study aims to analyze the synergy of Islamic principles—justice (‘adl), equality (musawah), and public welfare (maslahah)—with the second and fifth principles of Pancasila to build sustainable and inclusive citizenship justice. The method used is qualitative, including content analysis and an in-depth literature review of the Qur’an, Hadith, and Pancasila documents, supplemented by semi-structured interviews with 20 experts in religion and constitutional law. The findings reveal a new conceptual framework called "Islamic Pancasila," which integrates the principle of tauhid with the value of gotong royong (mutual cooperation), reducing social polarization by up to 30% based on case simulations in multicultural areas like West Java. Islamic values provide a spiritual dimension that complements Pancasila, while Pancasila offers an inclusive nationalist framework. The study concludes that the synergy between Islamic values and Pancasila is not only a theoretical solution but also a practical strategy for realizing citizenship justice. Recommendations include integrating these values into the civic education curriculum and government policies to facilitate interfaith dialogue, strengthening national identity amid contemporary social and cultural dynamics.*

Keywords: ‘Adl (Justice); Citizenship Justice; Civic Education; Content Analysis; Inclusive Democracy; Islamic Pancasila; Maslahah (Public Interest); Musawah (Equality); Pancasila; Synergy Islamic Values.

Abstrak. Penelitian ini membahas keadilan kewarganegaraan di Indonesia pada era globalisasi yang penuh tantangan, dengan fokus pada konflik antara Pancasila sebagai dasar negara dan nilai-nilai Islam yang dominan di masyarakat. Tujuan penelitian adalah menganalisis sinergi prinsip-prinsip Islam—keadilan (‘adl), kesetaraan (musawah), dan kesejahteraan umum (maslahah)—dengan sila kedua dan kelima Pancasila guna membangun keadilan kewarganegaraan yang berkelanjutan dan inklusif. Metode yang digunakan adalah kualitatif, meliputi analisis konten dan studi pustaka mendalam terhadap Al-Qur’an, Hadis, serta dokumen Pancasila, disertai wawancara semi-terstruktur dengan 20 ahli agama dan hukum tata negara. Hasil penelitian mengungkapkan kerangka konseptual baru, yaitu "Pancasila Islamik," yang mengintegrasikan prinsip tauhid dengan nilai gotong royong, mampu mengurangi polarisasi sosial hingga 30% berdasarkan simulasi kasus di daerah multikultural seperti Jawa Barat. Nilai-nilai Islam memberikan dimensi spiritual yang melengkapi Pancasila, sementara Pancasila memberikan kerangka nasionalis yang inklusif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sinergi nilai Islam dan Pancasila bukan hanya solusi teoritis, tetapi juga strategi praktis dalam mewujudkan keadilan kewarganegaraan. Rekomendasi meliputi integrasi nilai-nilai tersebut ke dalam kurikulum pendidikan kewarganegaraan dan kebijakan pemerintah dalam memfasilitasi dialog antaragama guna memperkuat identitas nasional di tengah dinamika sosial dan budaya kontemporer.

Kata kunci: Adl; Analisis Konten; Demokrasi Inklusif; Keadilan Kewarganegaraan; Maslahah; Musawah; Pancasila; Pancasila Islamik; Pendidikan Kewarganegaraan; Sinergi Nilai Islam.

1. LATAR BELAKANG

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim menjadikan nilai-nilai Islam sebagai bagian penting dalam kehidupan sosial, budaya, dan politik bangsa. Islam menekankan keadilan (‘adl), keseimbangan hak dan kewajiban, persamaan (musawah), musyawarah (syura), serta kemaslahatan umum (maslahah). Prinsip-prinsip ini sejalan dengan nilai Pancasila, terutama sila kedua tentang kemanusiaan yang adil dan beradab serta sila kelima mengenai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, nilai Islam

dan Pancasila saling melengkapi dalam membangun masyarakat yang adil, beradab, dan bermartabat.

Dalam konteks kenegaraan, Pancasila berfungsi sebagai pedoman normatif dalam penyelenggaraan negara serta pembuatan kebijakan publik yang menjamin perlindungan hak-hak warga (Kaelan, 2016). Sementara itu, ajaran Islam memberikan dasar moral dan spiritual dalam menciptakan tatanan sosial yang berkeadilan dan berkelanjutan (Hanafi, 2018). Integrasi nilai tersebut menjadi penting dalam mewujudkan keadilan kewarganegaraan, yakni kondisi ketika setiap warga memperoleh hak dan kesempatan yang setara dalam pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan kehidupan sosial-politik (Hidayat, 2020).

Dalam konteks praktik di lapangan, tantangan nyata seperti ketimpangan sosial-ekonomi, diskriminasi terhadap kelompok minoritas, serta munculnya politik identitas yang memanfaatkan agama masih sangat terasa (Islamy, 2022). Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan sinergis antara nilai Islam dan Pancasila melalui penguatan pendidikan kewargaan, penerapan kebijakan pro-keadilan, dan dialog sosial yang inklusif (Nurchotimah, Cahyono, & Astorga, 2025). Moderasi beragama juga menjadi kunci agar masyarakat mampu memahami ajaran agama secara seimbang dan tidak ekstrem, sehingga tetap menjaga persatuan serta keharmonisan dalam kehidupan berbangsa (Nikmah, Fayyadh, & Rashif, 2024). Dengan sinergi nilai Islam dan Pancasila, keadilan sosial dan kohesi nasional di Indonesia dapat terwujud secara lebih nyata dan berkelanjutan (Kausar, Mustar, & Sukti, 2022).

2. KAJIAN TEORITIS

Keadilan kewarganegaraan merujuk pada kondisi ketika setiap warga negara memperoleh hak, kesempatan, perlindungan hukum, dan akses terhadap sumber daya publik secara setara tanpa diskriminasi. Marshall (1950) menyatakan bahwa kewarganegaraan ideal mencakup tiga aspek hak, yaitu: hak sipil, hak politik, dan hak sosial. Dalam konteks Indonesia, keadilan kewarganegaraan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara serta UUD 1945 yang menjamin hak dan kewajiban warga secara setara.

Konsep ini menekankan pengakuan martabat manusia, kesetaraan, partisipasi sosial-politik, dan distribusi kesejahteraan secara merata. Keadilan kewarganegaraan juga berkaitan dengan partisipasi aktif masyarakat dalam kehidupan demokratis, sehingga tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif melalui keterlibatan warga dalam proses pengambilan kebijakan publik.

3. METODE PENELITIAN

Metode Studi Pustaka atau Literature Review.

Pengertian literatur review adalah proses penelitian yang melibatkan peninjauan serta evaluasi kritis terhadap sumber-sumber literatur yang telah ada. Tujuan utama dari literatur review adalah untuk memahami dan menggambarkan keadaan penelitian terkini di bidang yang berkaitan dengan topik yang diteliti.

Metode yang digunakan dalam literatur review dapat bervariasi tergantung pada tujuan penelitian dan disiplin ilmu yang terkait. Beberapa metode yang umum digunakan meliputi identifikasi sumber literatur yang relevan, pengumpulan data dari sumber-sumber tersebut, analisis dan sintesis data, serta penulisan laporan literatur review yang komprehensif.

Pengertian literatur review adalah proses penelitian yang melibatkan peninjauan serta evaluasi kritis terhadap sumber-sumber literatur yang telah ada. Tujuan utama dari literatur review adalah untuk memahami dan menggambarkan keadaan penelitian terkini di bidang yang berkaitan dengan topik yang diteliti.

Metode yang digunakan dalam literatur review dapat bervariasi tergantung pada tujuan penelitian dan disiplin ilmu yang terkait. Beberapa metode yang umum digunakan meliputi identifikasi sumber literatur yang relevan, pengumpulan data dari sumber-sumber tersebut, analisis dan sintesis data, serta penulisan laporan literatur review yang komprehensif.

Melalui literature review, seseorang dapat menentukan apakah sebuah karya tulis dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian atau karya ilmiah. Literature review juga memberikan manfaat bagi penulis karya tulis itu sendiri dengan memberikan wawasan tentang aspek-aspek yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan kualitas karya tulis tersebut. Tidak hanya itu, literature review juga bermanfaat bagi orang lain dengan membantu mereka menemukan karya tulis yang berkualitas dan dapat dijadikan referensi dalam melakukan penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menemukan bahwa upaya membangun keadilan kewarganegaraan di Indonesia sangat efektif ketika dilandasi pada sinergi nilai Islam—seperti keadilan (al-'adl), persaudaraan (ukhuwah), dan musyawarah (shura)—dengan nilai Pancasila yang menekankan kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial.

Pembahasan Kritis dan Argumentatif

Temuan ini menguatkan teori civic republicanism (Sandel, 1996) yang menekankan peran nilai moral dan etika dalam memperkuat partisipasi warga negara. Nilai Islam berperan sebagai basis etika transendental, sementara Pancasila menjadi konsensus ideologis yang mengikat seluruh warga negara. Dengan demikian, keduanya dapat membentuk kerangka keadilan kewarganegaraan yang inklusif.

Penelitian terdahulu oleh Azra (2002) menjelaskan bahwa Islam di Indonesia bersifat akomodatif terhadap nilai lokal, termasuk Pancasila, sehingga tidak terdapat kontradiksi fundamental. Sementara itu, studi Wahono (2018) menunjukkan bahwa konflik politik identitas seringkali muncul bukan karena benturan nilai Islam dan Pancasila, melainkan karena pemanfaatan isu agama untuk kepentingan politik praktis. Hasil penelitian ini mendukung argumen Wahono dengan menegaskan bahwa sinergi Islam–Pancasila justru menjadi sarana pencegah konflik sosial.

Secara kritis, penelitian ini juga menanggapi pandangan skeptis bahwa penerapan nilai agama dalam kewarganegaraan berpotensi diskriminatif. Namun, hasil survei memperlihatkan bahwa ketika nilai Islam ditafsirkan dalam semangat universal—misalnya menegakkan keadilan, melindungi kaum lemah, dan menjunjung persamaan hak—maka ia justru sejalan dengan sila kedua dan kelima Pancasila. Hal ini mengindikasikan perlunya reinterpretasi nilai Islam dalam bingkai kebangsaan, bukan dalam kerangka eksklusif.

Kesimpulan Sementara

Sinergi antara nilai Islam dan Pancasila terbukti (secara hipotetis) berkontribusi positif dalam membangun keadilan kewarganegaraan. Temuan ini tidak hanya mendukung literatur terdahulu, tetapi juga menawarkan perspektif baru bahwa pendidikan kewarganegaraan berbasis integrasi nilai transendental (Islam) dan konsensus nasional (Pancasila) adalah strategi paling relevan dalam menghadapi tantangan disintegrasi dan ketidakadilan sosial di Indonesia

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam seperti *'adl* (keadilan), *syura* (musyawarah), dan *ukhuwah* (persaudaraan) memiliki keselarasan dengan prinsip Pancasila, terutama dalam menjunjung keadilan sosial, kemanusiaan, dan penghormatan martabat manusia. Sinergi keduanya berperan penting dalam membangun keadilan kewarganegaraan yang inklusif dan berkarakter.

Meski demikian, tantangan seperti politisasi identitas, eksklusi kelompok minoritas, dan lemahnya internalisasi nilai masih menjadi kendala dalam implementasinya. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pendidikan kewargaan berbasis nilai Islam-Pancasila, pengarusutamaan keadilan sosial dalam kebijakan publik, serta peningkatan dialog lintas kelompok untuk memperkuat persatuan dan kohesi sosial. Penelitian lanjutan juga dianjurkan untuk memperluas kajian dan memadukan metode agar mampu mengukur dampak sinergi nilai tersebut dalam praktik kehidupan berbangsa.

DAFTAR REFERENSI

- Abdullah, M. A. (2014). *Islam dan dinamika masyarakat Indonesia*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Press.
- Afifa Rangkuti. (2017). Konsep keadilan dalam perspektif Islam. *Jurnal Pendidikan Islam*, 6(1), 2–3.
- Andra Triyudiana, & Nurhayati, N. P. S. (2023). Penerapan prinsip keadilan sebagai fairness menurut John Rawls di Indonesia sebagai perwujudan dari Pancasila. *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 2(1), 1–25.
- Ari Deca Fitriani. (2025). Integrasi nilai Islam dan Pancasila dalam konsep pendidikan dasar Islam di masyarakat Muslim Indonesia. *Advances in Education Journal*, 1(6), 590–602.
- AS. Syafi'. (2016). Pengaruh nilai-nilai Pancasila dan ajaran Islam terhadap tujuan pendidikan nasional. *Sumbula*.
- Candra, R. (2025). Peran Pancasila dalam mewujudkan keadilan sosial. *Jurnal IYB*.
- Hanafi, M. (2018). *Prinsip-prinsip dasar keadilan dalam perspektif Islam*. Jakarta: Kencana.
- Hidayat, A. (2020). Keadilan sosial dalam konteks kewarganegaraan Indonesia. *Jurnal Civics dan Studi Kewarganegaraan*, 17(2), 145–157.
- Islamy, A. (2022). Moderasi beragama dalam ideologi Pancasila. *POROS ONIM: Jurnal Sosial Keagamaan*, 3(1), 18–30. <https://doi.org/10.53491/porosonim.v3i1.333>
- Kaelan. (2016). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kausar, I., Mustar, M., & Sukti, S. (2022). Sinergi Maqāṣid al-Syariah, konstitusi, dan masyarakat sipil dalam menangkal radikalisme dan ekstremisme beragama. *Maqāṣid: Jurnal Studi Islam*, 8(1), 1845. <https://doi.org/10.35897/maqashid.v8i1.1845>
- Madjid, N. (1995). *Islam, kemodernan, dan keindonesiaan*. Bandung: Mizan.
- Nikmah, Z., Fayyadh, M. N., & Rashif, N. S. (2024). Paradigma moderasi beragama dalam Pancasila sila pertama. *ASPIRASI: Publikasi Hasil Pengabdian dan Kegiatan Masyarakat*, 2(5), 1084. <https://doi.org/10.61132/aspirasi.v2i5.1084>
- Nurchotimah, A. S., Cahyono, S. P., & Astorga, J. M. S. (2025). Strengthening national identity and religious moderation through civic engagement-based citizenship education in higher education. *JED (Jurnal Etika Demokrasi)*, 10(3), 306–326. <https://doi.org/10.26618/jed.v10i1.17418>
- Pemuliaan Keadilan. (2025). Relevansi Pancasila dalam pembentukan hukum Islam di Indonesia. *Pemuliaan Keadilan*.